

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia diperkirakan mencapai masa keemasan tepat dalam usia 100 tahun pasca kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 2045, dan diyakini pada tahun 2035 usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan usia yang tidak produktif sehingga menjadi bonus demografi untuk bangsa kita. Menurut Aryanto (2016, hlm. 431) “Pada periode tersebut generasi penerus bangsa berada pada titik yang sangat produktif, sangat berharga dan sangat bernilai”. Oleh karena itu bonus demografi tersebut perlu dikelola dan dimanfaatkan dengan baik agar berkualitas menjadi insan yang berkarakter, insan yang cerdas, dan insan yang kompetitif. tetapi jika bonus demografi ini tidak dapat dikelola dengan baik tentunya bisa menjadi bencana besar bagi pembangunan bangsa Indonesia mendatang.

Harapan terhadap generasi emas 2045 merupakan jawaban terhadap fenomena paradok sial tentang Indonesia. Fenomena ini dikemukakan oleh Habibie (dalam Prasetyo 2014, hlm.2) bahwa:

- (1) Kita kaya tapi miskin, yaitu SDA melimpah tapi miskin penghasilan,
- (2) Kita besar tapi kerdil, amat besar wilayah dan penduduknya tapi kerdil dalam produktivitas dan daya saing,
- (3) Kita kuat tapi lemah, kuat dalam anarkisme tapi lemah dalam tantangan global, dan
- (4) Kita indah tapi buruk, indah dalam potensi dan prospeknya namun buruk dalam pengelolaannya.

Ada tiga permasalahan utama yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia saat ini, diantaranya permasalahan ekonomi dalam menumbuhkan mental berwirausaha, lingkungan alam, dan pendidikan. Berdasarkan data hasil daya saing Indonesia di mata dunia dapat diketahui bahwa dari 137 negara yang masuk dalam daftar *Global Competitive Index (CGI)* tahun 2017-2018, Indonesia berada di peringkat 36 dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang berada di peringkat 41, namun seperti halnya tahun sebelumnya bahwa Indonesia masih kurang dalam 3 bidang, diantaranya permasalahan daya serap ketenagakerjaan yang berimplikasi terhadap bidang ekonomi mengingat sebagian besar warga Indonesia memiliki mental pegawai

bukan mental wirausaha, permasalahan lingkungan alam yang berimplikasi buruknya bidang kesehatan, dan yang paling fundamental adalah permasalahan pendidikan terutama di bidang kependidikan dasar (Ramadhan, 2017)

Permasalahan pertama adalah permasalahan ekonomi. Salah satu permasalahan perekonomian yang dihadapi Bangsa Indonesia adalah kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjadi seorang wirausahawan, mengingat banyaknya warga Indonesia yang lebih memilih menjadi pegawai dari pada menjadi seorang pengusaha. Penanaman nilai-nilai kewirausahaan di Indonesia masih dianggap kurang masif dikarenakan jumlah pengusaha di Indonesia lebih sedikit apabila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menyatakan jumlah pengusaha di Indonesia saat ini mencapai 3,10 persen dari jumlah penduduk Indonesia 225 juta sehingga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 1,43 persen (Wicaksono, 2017). Walaupun jumlah pengusaha atau wirausahawan di Indonesia meningkat pesat, namun kita sebagai warga negara jangan puas melihat hasil saat ini, dan harus mengupayakan peningkatan dari tahun ketahun. Apalagi dengan menjadi pengusaha atau wirausaha, kita dapat meningkatkan kapasitas diri kita secara personal dan membuka peluang kerja untuk masyarakat secara lebih luas. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Praag & Versloot (2007, hlm. 46) bahwa kontribusi pengusaha untuk perekonomian yaitu: “(1) Penciptaan lapangan kerja yang dinamis; (2) inovasi; (3) produktivitas dan pertumbuhan; (4) peran kewirausahaan dapat meningkatkan utilitas individu”.

Pendidikan kewirausahaan, atau penanaman nilai-nilai kewirausahaan sebaiknya dimulai dari usia kanak-kanak, apalagi ini merupakan upaya berkelanjutan dalam menciptakan SDM yang berkualitas di tahun emas 2045. “SDM yang memiliki jiwa kewirausahaan adalah hasil jangka panjang yang timbul dari proses pencapaian dan kemampuan kognitif masa kanak-kanak” (Jones dan Jayawarna, 2011, hlm. 55). Dari hasil penelitian *The National Child Development Study* (NCDS) bahwa sebagian besar pengusaha muda yang berada di usia 33 tahun merupakan hasil penanaman nilai-nilai kewirausahaan sejak dini (Syifausakia, 2016). Nilai-nilai kewirausahaan merupakan bagian dari

pendidikan karakter, yang idealnya ditanamkan sejak dini. Usia kanak-kanak merupakan usia yang tepat dalam menanamkan nilai-nilai karakter dan sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya (Sudaryanti, 2012).

Permasalahan kedua adalah permasalahan lingkungan alam yang berimplikasi terhadap kenyamanan dalam menjalani kehidupan manusia sebagai bagian dari ekosistem. Tidak dapat dipungkiri terdapat ketidakseimbangan pola perilaku manusia dalam mengeksploitasi Sumber Daya Alam (SDA). Salah satu contohnya permasalahan sampah plastik yang semakin mengawatirkan. Kini, Indonesia menjadi negara urutan kedua sebagai penyumbang sampah terbesar di dunia (Wahyuni, 2016).

Dalam lingkup nasional, (dengan asumsi jumlah penduduk 180 juta jiwa, laju produksi sampah setiap orang adalah dua liter perhari dengan komposisi 6,17%) sehingga jumlah timbunan sampah di Indonesia setiap tahunnya dapat mencapai 1.599.000 ton (Oktapianto, 2016). Permasalahan sampah bukanlah permasalahan sederhana, dan bukan satu-satunya permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut juga dapat memicu permasalahan lingkungan lainnya termasuk memicu terjadinya *global warming* atau pemanasan global. “Peningkatan temperatur rata-rata permukaan bumi yang kian meninggi diakibatkan aktivitas manusia yang tidak bertanggungjawab dalam mengelola lingkungannya dan mengancam kehidupannya” (Sudarman, 2011. hlm. 5). Kedua permasalahan lingkungan alam tersebut adalah sebagian kecil dari berbagai permasalahan lingkungan alam yang terjadi di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa bangsa Indonesia perlu mengupayakan penanaman nilai-nilai peduli lingkungan yang berkaitan dengan kecerdasan ekologis terlebih dalam menyiapkan generasi emas 2045.

Ketiga, permasalahan pendidikan yang memiliki peranan sangat sentral dan fundamental dalam menyiapkan generasi emas 2045 melalui penanaman nilai-nilai karakter sejak dini. Tidak dapat dipungkiri hal tersebut dapat menjadi upaya solutif dalam menuntaskan dua permasalahan tadi, yakni permasalahan ekonomi maupun lingkungan alam yang terjadi hingga kini.

Pendidikan diyakini sebagai sebuah bentuk investasi jangka panjang yang memiliki peranan strategis dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, sangat penting untuk merestrukturisasi dan mereformulasi desain pendidikan yang dapat mendukung terciptanya generasi emas Bangsa Indonesia. (Dongoran, 2014). Generasi emas adalah generasi yang membuat perubahan dan merubah keadaan dan harga diri bangsa Indonesia semakin berharga di mata dunia (Rahmat, 2016). Kita tentunya memiliki harapan besar kepada anak-anak generasi kita saat ini untuk bisa benar-benar menjadi generasi emas di abad 21 dan membawa kemajuan serta kejayaan bagi Bangsa Indonesia tepat pada satu abad kemerdekaan Indonesia. Pendidikan di Indonesia saat ini belum mampu mewujudkan hal tersebut dan hingga kini dihadapkan pada berbagai permasalahan, salah satunya yaitu diskriminasi dalam mengakomodasi keberagaman peserta didik di sekolah, walaupun sebenarnya upaya pemenuhan hak pendidikan berkembang kearah kemajuan, hal tersebut tercermin pengubahan sistem sekolah segregasi menjadi integrasi yang kemudian saat ini melahirkan wacana pendidikan inklusi.

Pendidikan inklusi dipandang sebagai salah satu opsi cerdas dalam menjembatani tujuan pendidikan untuk semua. Menurut Sunaryo (2009. hlm.1) ”pendidikan inklusif sebagai suatu pendekatan pendidikan yang inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak, termasuk dengan anak disabilitas”. Sekalipun perkembangan pendidikan inklusif di Indonesia cukup menggembirakan, mendapat apresiasi dan antusiasme dari berbagai kalangan terutama oleh praktisi pendidikan, namun sejauh ini dalam tataran implementasinya di lapangan masih dihadapkan dengan berbagai isu dan permasalahan. Berikut beberapa permasalahan penyelenggaraan pendidikan inklusi berdasarkan hasil penelitian Sunardi (2009) terhadap 12 sekolah penyelenggara inklusi di Kabupaten dan Kota Bandung, yaitu:

Secara umum saat ini terdapat lima kelompok *issue* dan permasalahan pendidikan inklusif di tingkat sekolah yang perlu dicermati dan diantisipasi agar tidak menghambat, implementasinya tidak bias, dan bahkan meninggalkan esensi pendidikan inklusif itu sendiri, yaitu: pemahaman dan implementasinya, kebijakan sekolah, proses program, kondisi guru, dan *support system* terutama dalam penyiapan anak.

Mengenai permasalahan dalam implementasi pendidikan inklusif ini tidak terjadi di Kota Bandung saja, dalam penelitian Irwanto Perunan (2012) tentang implementasi pendidikan inklusi di SD x, y, dan z di Kota Jayapura pun mengungkapkan permasalahan yang hampir sama.

Masalah yang terjadi diantaranya kurangnya pemahaman guru tentang pendidikan inklusi, kurangnya pemahaman dan penerimaan guru terhadap anak disabilitas, kurangnya penerimaan pendidikan inklusif di sekolah, serta belum optimalnya layanan pendidikan untuk anak dengan disabilitas di sekolah.

Terlepas dari berbagai permasalahan yang terjadi dalam penyelenggarannya, pendidikan inklusi tetap dipandang sebagai salah satu gambaran ideal sistem pendidikan di Indonesia masa kini dan masa yang akan datang, karena memiliki prinsip (*education for all*) yang artinya pendidikan harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguisitik, dan kondisi lainnya.

Sekolah Dasar (SD) sebagai salah satu jenjang yang tepat dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif sekaligus memiliki posisi strategis dalam menanamkan nilai-nilai karakter yang mendukung terciptanya generasi emas 2045. Menurut Aryanto (2016, hlm. 431) “Keberhasilan pendidikan di tingkat/jenjang berikutnya ditentukan berdasarkan keberhasilan anak di SD”. Karakter anak di usia SD akan mudah dibentuk dan melekat pada diri mereka hingga dewasa. Piaget (dalam Sadulloh dkk., 2006, hlm. 98) mengungkapkan bahwa:

Anak di usia SD sebagian besar berada dalam tahap operasional kongkret, artinya karakteristik anak SD dicirikan dengan pemikiran yang reversibel, mulai mengkonfirmasi pemikiran tertentu, adaptasi gambaran yang menyeluruh, melihat suatu objek dari berbagai sudut pandang, mampu melakukan seriasi, dan berfikir kausalitas.

Menurut Aryanto (2016, hlm. 788) “*The children in primary age is the right age to plant good character and it will become an effort in facing the golden era of Indonesia in the 21st century*”. Yang berarti anak usia SD merupakan usia yang tepat dalam menanamkan nilai-nilai karakter dan menjadi upaya solutif dalam menyongsong masa keemasan Indonesia di abad 21. Apalagi kini

pemerintah mewajibkan setiap SD untuk menjadi sekolah inklusif seperti dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat 2 Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa bahwa: “Satuan pendidikan selain yang ditunjuk oleh kabupaten/kota dapat menerima peserta didik sebagaimana dimaksud.”

Oleh karena itu, berdasarkan ketiga permasalahan utama yang dijelaskan dalam pernyataan sebelumnya berkaitan dengan permasalahan ekonomi, lingkungan dan pendidikan yang dihadapi Bangsa Indonesia saat ini, maka perlu upaya antisipatif dalam menciptakan SDM Indonesia yang pintar secara personal maupun interpersonal dalam upaya mewujudkan generasi emas di tahun 2045. Bidang pendidikan dipandang sebagai bidang yang paling fundamental dan menjadi prioritas dalam menjawab ketiga permasalahan tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam dunia pendidikan adalah penanaman nilai-nilai *ecopreneurship* sejak dini terutama di jenjang Sekolah Dasar inklusif.

Pemilihan sekolah inklusif sebagai tempat penelitian ini diharapkan mampu merepresentasikan gambaran layanan pendidikan yang menyeluruh dan tidak bekepipakan, sehingga esensi pendidikan dapat dirasakan oleh peserta didik normal maupun peserta didik berkebutuhan khusus yang nantinya program *ecopreneurship* ini akan menjadi langkah antisipatif dan modal jangka panjang dalam menghadapi perubahan global di tahun 2045 yang mengedepankan keberagaman dalam kesatuan mengingat tanggungjawab dari sistem pendidikan saat ini adalah untuk mendidik semua anak (UNESCO, 1994)

Ecopreneurship berasal dari kata *ecoliteracy* dan *enterpreneuership*. Menurut Goleman *ecoliteracy* didefinisikan sebagai integrasi empati, melihat perspektif orang lain, dan kerja sama, dengan pemahaman dan penghormatan terhadap ekosistem (dalam Supriatna, 2016), sehingga hal tersebut dapat didefinisikan sebagai bentuk keterampilan sosial yang menekankan kepedulian terhadap lingkungan alam. Sedangkan Aryanto (2017, hlm. 433) mendefinisikan kewirausahaan sebagai “kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru

dalam kreatif / inovatif dan mampu mengambil risiko atas keputusan dan melaksanakannya sebagai hasil ciptaannya yang terbaik”. Berdasarkan dua gagasan tersebut dapat diketahui bahwa *ecopreneurship* merupakan nilai-nilai karakter dan atau keterampilan sosial yang dimiliki peserta didik dalam upaya mencintai dan menjaga keseimbangan lingkungan sekitar serta memiliki karakter seperti seorang *entrepreneur*. Hal tersebut sejalan dengan Schaper yang mendefinisikan *ecopreneurship* sebagai bentuk wirausaha yang berwawasan lingkungan dalam menjalankan usahanya (Schaper, 2002).

Belum banyak penelitian yang menjelaskan terkait penerapan *ecopreneurship* di SD secara khusus, namun penelitian yang relevan dengan nilai-nilai kewirausahaan dan kecerdasan ekologis sudah cukup banyak, salah satunya penelitian tersebut dilakukan oleh Handayani (2012) dengan judul Implementasi Program Pendidikan Wirausaha Pada Anak Usia Dini yang dilakukan melalui studi kasus pada kelompok B Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Centeh Kota Bandung. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa perencanaan pendidikan nilai-nilai kewirausahaan berbeda dengan perencanaan program biasa yang menekankan pada poin kewirausahaannya dalam format perencanaan programnya, disamping itu pelaksanaan program mengembangkan 11 nilai, diantaranya: mandiri, kreatif, tanggungjawab, disiplin, rasa ingin tahu yang tinggi, komunikatif, jujur, inovatif, kepemimpinan, kerjasama dan kerja keras.

Hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kecerdasan ekologis dapat dilihat melalui penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Oktaviani (2015) dengan judul Peningkatan Kecerdasan Ekologis Peserta didik Pada Aspek Empati Terhadap Makhluh Hidup Melalui Media Video dalam program IPS. Hasil penelitian ini lebih menekankan terkait peningkatan kecerdasan ekologis sebanyak 87.71% dengan indikator mampu menjaga situasi rukun dan tertib di kelas, mampu membantu kesulitan orang lain, mampu memelihara keberadaan hewan di kelas maupun sekolah, mampu memelihara keberadaan tumbuhan di kelas, sekolah, dan lingkungan sekitar, dan mampu memanfaatkan tumbuhan yang ada di kebun, sekolah dan lingkungan sekitar.

Ecopreneurship dipandang sebagai gagasan baru dalam dunia pendidikan, khususnya dalam layanan pendidikan inklusif. Sehingga diharapkan penelitian ini menjadi inovasi dalam memberikan gambaran pendidikan yang bermakna dan futuristik. Pada prinsipnya *ecopreneurship* sangat mengedepankan lingkungan alam dan nilai-nilai kewirausahaan sebagai dasar dalam menentukan pola perilaku peserta didik yang beranekaragam, sehingga hal tersebut yang membedakan dengan pola pendidikan konvensional pada umumnya. Seorang *ecopreneur* adalah “mereka yang mampu menyeimbangkan antara pola perilaku wirausaha dan perkembangan lingkungan hidup” (Sukoco & Muhyi. 2015, hlm. 157). Apabila *ecopreneurship* diterapkan dalam konteks pendidikan maka peserta didik harus mampu mereduksi, meminimalisasi atau mengantisipasi permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini ditunjang dengan pengamalan nilai-nilai kewirausahaan dalam kehidupannya. Konsep ini akan sangat bermanfaat bagi peserta didik berkebutuhan khusus mengingat fakta di lapangan bahwa perlakuan terhadap para penyandang kebutuhan khusus masih tidak adil. Khususnya di dunia kerja, para penyandang kebutuhan khusus tidak mudah diterima di tempat kerja yang layak (Purwanta, dkk. 2016)

Hasil Riskesdas tahun 2012 (Kementerian Kesehatan RI, 2012:43) diketahui bahwa prevalensi disabilitas tertinggi adalah pada kelompok orang yang tidak bekerja, yaitu sebesar 14,4%, kelompok wiraswasta/ petani/ nelayan/ buruh sebanyak 8 dan yang terendah pada kelompok orang yang bekerja sebagai pegawai sebanyak 6%. (Purwanta, dkk., 2016, hlm. 440)

Oleh karena itu, konsep *ecopreneurship* diharapkan menjadi langkah antisipatif dan investasi jangka panjang bagi peserta didik berkebutuhan khusus dalam menumbuhkan mental berwirausaha sejak dini yang diimbangi dengan kecintaan terhadap lingkungan alam, sehingga diharapkan kedepannya tidak ada permasalahan kesenjangan dalam mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas karena sejak dini mulai ditanamkan nilai-nilai *ecopreneurship*.

Secara konseptual, *ecopreneurship* lebih banyak dikaji dalam bidang ekonomi, dan belum ada penelitian secara khusus yang mengkaji *ecopreneurship* di bidang pendidikan. Walaupun demikian, secara implisit konsep *ecopreneurship* mulai diterapkan di beberapa sekolah di Indonesia salah satunya di SDN Cibabat Mandiri 2 yang berada di Jalan Pesantren No. 107, Kelurahan

Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Sekolah ini dianggap sebagai representasi SD Inklusif yang mencoba untuk mengimplementasikan *ecopreneurship* dalam pengembangan programnya sesuai dengan visi sekolahnya yaitu “Menciptakan Peserta Didik Yang Berprestasi, Berakhlakul Karimah, Cinta Lingkungan, dan Kreatif Berdasarkan Imtaq dan Iptek”.

Sekolah ini berdiri sejak tahun 1982 berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 05 Tahun 1981 dan pada tanggal 21 Desember 1983 mulai digunakan. Dalam perkembangannya, sekolah ini ditunjuk sebagai induk penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Cimahi pada tahun 2003, sehingga SD ini dapat dikatakan sebagai model penyelenggaraan pendidikan inkusi di Kota Cimahi. Terdapat 52 Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dengan klasifikasi 21 peserta didik ABK permanen dan 31 peserta didik ABK *temporary*. Guru Pendamping Khusus (GPK) di SD ini terdapat 2 orang, dan salah satu nya adalah orthopedagog. Berdasarkan hasil studi pendahuluan melalui hasil wawancara dengan salah satu guru pendamping khusus di sekolah tersebut, diketahui bahwa secara implisit pihak sekolah sudah mulai menerapkan *ecopreneurship* walaupun belum dapat dipastikan penerapan program yang telah dilakukan sesuai dengan nilai-nilai *ecopreneurship* atau tidak. Apalagi SD ini merupakan sekolah inklusif, sehingga memungkinkan adanya bentuk intervensi berkaitan dengan penanaman nilai-nilai *ecopreneurship* pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang berada di sekolah tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian studi kasus dengan judul : Implementasi Program *Ecopreneurship* di Sekolah Inklusif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana perencanaan program *ecopreneurship* di SD Inklusif ?
2. Bagaimana pelaksanaan program *ecopreneurship* di SD Inklusif ?
3. Bagaimana dampak program *ecopreneurship* pada peserta didik di SD Inklusif ?
4. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi sekolah dalam mengimplementasikan program *ecopreneurship* di SD Inklusif ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka tujuan yang dapat dirumuskan, diantaranya:

1. Mendeskripsikan perencanaan program *ecopreneurship* di SD Inklusif.
2. Mendeskripsikan pelaksanaan program *ecopreneurship* di SD Inklusif.
3. Mengidentifikasi dampak program *ecopreneurship* pada peserta didik di SD Inklusif.
4. Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi sekolah dalam mengimplementasikan program *ecopreneurship* di SD Inklusif.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan, terutama dalam memberikan gambaran program inovatif yang dilandasi pada prinsip kebutuhan Bangsa Indonesia di masa kini dan masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam kepentingan praktik atau pelaksanaan program.

a. Guru

Manfaat penelitian ini bagi guru sebagai referensi guru dalam mengembangkan program kreatif di sekolah dasar inklusif, sehingga guru dapat memberikan intervensi yang tepat pada peserta didik berkebutuhan khusus yang heterogen.

b. Sekolah

Manfaat penelitian ini bagi sekolah yaitu dapat memberikan kontribusi pemikiran baru untuk meningkatkan kualitas program di sekolah dasar yang mengedepankan pada prinsip *education for all* berbasis *ecopreneurship*.

c. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

Manfaat penelitian ini bagi peserta didik yaitu sebagai gambaran dalam mengaktualisasikan potensi, minat, dan bakat peserta didik berkebutuhan khusus dalam mengimplementasikan *ecopreneurship* di kehidupannya.

d. Peneliti Lainnya

Adanya penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi peneliti lainnya dalam membuat penelitian selanjutnya berkenaan dengan pengembangan program *ecopreneurship*.

e. Dinas Pendidikan

Secara lebih luas, hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu langkah antisipatif dalam menciptakan program pembelajaran inovatif yang dapat dikembangkan secara lebih masif di setiap sekolah Inklusif melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan di Indonesia.

E. Struktur Organisasi Penulisan

Struktur organisasi dimaksudkan untuk memahami alur pikir dalam penulisan laporan hasil penelitian ini, maka hal ini dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi penulisan.

BAB II berisi kajian teori. Kajian teori berfungsi sebagai landasan teoretis dalam menyusun dan menjawab rumusan masalah, berikut hal-hal yang terdapat dalam kajian teori diantaranya: Hakikat *ecopreneurship*, hakikat pendidikan inklusif, karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus, prinsip-prinsip *ecopreneurship* di Sekolah Dasar (SD) inklusif, pengembangan program *ecopreneurship* di SD inklusif, indikator keberhasilan peserta didik dalam program *ecopreneurship*, penanaman nilai-nilai *ecopreneurship* di SD inklusif, dan *ecopreneurship* dalam prespektif pendidikan abad 21.

BAB III berisi penjelasan yang rinci mengenai metode penelitian. Komponen dari metode penelitian terdiri: Desain dan metode penelitian, tempat dan partisipan penelitian, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, teknik analisis data, dan validitas serta reliabilitas. BAB IV berisi hasil penelitian dan pembahasan, sedangkan BAB V berisi tentang simpulan, implikasi, dan rekomendasi yang menyajikan tentang penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap temuan penelitian.

Daftar pustaka memuat semua sumber yang pernah dikutip dan digunakan dalam penulisan tesis, dan lampiran berisi semua dokumen yang digunakan dalam penelitian.